

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  
TRANS METRO BANDUNG DAN MONOREL DI KOTA  
BANDUNG**  
***PUBLIC PARTICIPATION IN PLANNING PROCESS OF TRANS  
METRO BANDUNG AND MONORAIL IN BANDUNG CITY***

**Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Jalan H.S. Ronggowaluyo Gedung Unsika Lantai 3, Karawang**

**Indra Aditya<sup>1</sup>  
e-mail: indraditya@staff.unsika.ac.id**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Latar belakang penelitian yaitu adanya penolakan terhadap kebijakan Trans Metro Bandung sebagai perwujudan transportasi massal. Penolakan ini memberikan gambaran proses perencanaan yang belum melibatkan masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung sedang merencanakan Monorel untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi massal sebagai upaya menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada di Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memberikan akses informasi perencanaan melalui sosialisasi dalam rapat laporan perencanaan, konsultasi publik, sosialisasi media massa, situs resmi, dan media sosial. Forum-forum pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat laporan perencanaan namun akses untuk ini masih terbatas. Kesempatan untuk mengajukan setiap issue perencanaan terutama dilakukan melalui media massa dan media sosial. Kesempatan untuk mengajukan setiap gugatan dilakukan melalui media massa dan media sosial. Sedangkan pertimbangan untuk gugatan-gugatan dilakukan Pemerintah Kota Bandung terutama melalui penyelesaian administratif dan pembentukan badan konsorsium.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Transportasi Massal

**ABSTRACT**

*This study examines the public participation in the planning Trans Metro Bandung and Monorail in the city of Bandung. Background research that there was refusal of the policy of Trans Metro Bandung as the embodiment of mass transportation. This refusal illustrate the planning process has not involved the community. On the other hand, Bandung City Government is planning a Monorail to meet the needs of mass transportation services in an effort to solve the problems of transportation in the city of Bandung.*

*The method used in this research is qualitative method with descriptive approach. The research seeks to describe or depict in detail or depth of community participation in planning Bandung Trans Metro and monorail in the city of Bandung. With the selection of descriptive qualitative design, the authors approach the object of research by digging information in accordance with the perception of the author and informants, and can develop in accordance with the interaction that occurs in the interview process.*

*The results showed that the Government of Bandung has provided access to information dissemination in the meeting planning through planning report, a public consultation, dissemination of mass media, the official website, and media-forum sosial. Forum decisions made in meetings planning report but access to it is limited. The opportunity to ask every issue of planning is mainly done through the mass media and social media. The opportunity to ask any claim made through the mass media and social media. While consideration for lawsuits by the Government of Bandung mainly through administrative settlement and the formation of a consortium of agencies.*

**Keyword:** *Public Participation, Planning, Mass Transportation*

**Pendahuluan**

Pelayanan sektor transportasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemerintahan dalam rangka pembangunan wilayah perkotaan Indonesia. Saat ini, kota-kota besar di Indonesia mengalami permasalahan transportasi, salah satunya adalah kemacetan yang semakin parah. Dengan kondisi kota-kota yang macet maka berimbas pada pelayanan sektor lainnya yang ikut terganggu karena terhambatnya mobilitas seluruh penduduk dalam melakukan kegiatan mereka.

Kondisi transportasi saat ini merupakan hasil perencanaan pembangunan masa lalu. Sebelumnya, pendekatan perencanaan terpusat (*state centered planning*), dengan

menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek pembangunan, mendominasi pola-pola perencanaan kota-kota besar di Indonesia.

Di Kota Bandung pembangunan transportasi berkelanjutan semakin dibutuhkan karena Kota Bandung memiliki fungsi strategis sebagai kota yang melayani kegiatan skala internasional dan nasional. Namun saat ini memberikan gambaran buruknya pelayanan sektor transportasi di Kota Bandung karena jumlah kendaraan semakin bertambah sementara kapasitas jalan tidak mampu mengatasi jumlah kendaraan.

Pengembangan transportasi massal merupakan kebijakan yang dipilih Pemerintah Kota Bandung untuk mengurangi kemacetan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi massal, Kota Bandung mengimplementasikan kebijakan sistem transportasi Trans Metro Bandung (TMB). Namun, dalam implementasinya kebijakan TMB banyak terdapat kelemahan. Permasalahan yang timbul dalam implementasi adalah penolakan dari stakeholders terutama dari pengusaha angkutan perkotaan. Hal ini menyebabkan operasional TMB yang memakan waktu cukup lama dari perencanaan operasionalisasinya. Selain itu, ketika TMB telah dioperasikan kondisi sarana dan prasarana transportasi sudah dalam kondisi pelayanan yang tidak maksimal, seperti shelter dan armada bus yang sudah rusak.

Kebijakan pengembangan infrastruktur Monorel menjadi alternatif selanjutnya dalam menyediakan pelayanan transportasi massal di Kota Bandung. Namun, berdasarkan penelusuran berbagai sumber, berita mengenai Monorel di media massa hanya didominasi oleh perkembangan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung. Akses masyarakat terhadap informasi-informasi penting terkait perencanaan Monorel masih sangat terbatas. Penelusuran berita media massa pun, tidak memberikan informasi tentang kegiatan forum-forum diskusi terbuka yang digagas Pemerintah Kota Bandung untuk menjangkau opini masyarakat terkait kebijakan monorel.

Salah satu syarat dalam mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan, maka dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemerintah di dorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Raad dan Barter (2000:2-4) menyebutkan sistem transportasi dikembangkan untuk melayani kebutuhan masyarakat karena itu masyarakat harus diberikan porsi yang cukup untuk ikut menentukan moda transportasi yang digunakan serta terlibat dalam proses pengadaannya.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan fokus kajian yang berbeda, diantaranya penelitian yang dilakukan Wibowo (2009); Alfrianda (2010); Sumiyarsono (2010); Prayitno (2008); dan Rahman (2010). Penelitian-penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi gambaran bagi penulis dalam mendalami dan memahami teori-teori yang telah ada, sekaligus menjadi acuan untuk memperjelas posisi penelitian yang ditulis ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Deskripsi dan analisis mengenai partisipasi masyarakat dilakukan terhadap akses informasi, akses terhadap forum pengambilan keputusan, kesempatan untuk membuka setiap issue ke dalam diskusi, kesempatan untuk mengajukan gugatan, dan pertimbangan yang diberikan terhadap gugatan-gugatan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Creswell (2012:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Nazir (1983:20), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan rehabilitas. Melalui metode penelitian kualitatif-deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung.

Sesuai dengan relevansi informan dan kebutuhan data, target informan kunci sebelumnya adalah masing-masing kepala satuan kerja dan perangkat daerah Kota Bandung, terutama Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung untuk kategori pemerintah. Berdasarkan perkembangan penelitian di lapangan, wawancara didelegasikan kepada masing-masing staf yang lebih mengetahui proses perencanaan. Staf-staf ini secara intensif mengikuti setiap tahapan proses perencanaan karena penugasan yang diberikan untuk mengikuti setiap forum-forum diskusi yang dilakukan dalam rangka

perencanaan TMB dan Monorel. Untuk kategori non-pemerintah, informan penelitian ini juga merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam perencanaan TMB dan Monorel. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Seno Wibowo

Seno Wibowo adalah staf Unit Pelaksana Teknis Trans Metro Bandung (UPT TMB) Dinas Perhubungan Kota Bandung. Seno Wibowo merupakan staf yang selalu ditunjuk untuk mengikuti berbagai forum diskusi pembahasan TMB mengingat keterbatasan kesehatan Kepala UPT TMB (Yadi Haryadi).

2. Apip Syakur Apipi

Apip Syakur Apipi adalah staf UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. UPT Parkir Kota Bandung merupakan instansi yang ditunjuk untuk mengelola perencanaan Monorel karena Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memiliki unit pelaksana yang secara khusus mengurus hal ini. Apip Syakur Apipi ditugaskan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Perencanaan Prastudi Kelayakan Monorel Koridor 1 Kota Bandung. Apip Syakur Apipi merupakan petugas teknis yang mendampingi konsultan perencana dalam melakukan penyusunan studi perencanaan ini sehingga sangat mengetahui setiap tahapan perencanaan monorel Kota Bandung.

3. Andriya Madriya Putra

Andriya Madriya Putra adalah staf Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Andriya Madriya Putra ditugaskan untuk mendampingi setiap kegiatan yang terkait perencanaan fisik dan tata ruang di Kota Bandung. Dalam forum-forum terkait transportasi massal, baik TMB maupun Monorel, Andriya selalu menjadi anggota delegasi yang dikirimkan BAPPEDA untuk mensinergikan setiap perencanaan di sektor-sektor lainnya.

4. Leonardus Bambang Prasetyo

Leonardus Bambang Prasetyo adalah peneliti dari Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). LAPI ITB merupakan rekanan perencana teknis Monorel Kota Bandung, dan Leonardus Bambang Prasetyo merupakan Asisten Ketua Tim Konsultan. Leonardus Bambang Prasetyo selalu menjadi salah satu tim yang mempresentasikan Prastudi Kelayakan di setiap forum diskusi (*expose*) Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung. Posisi Leonardus Bambang Prasetyo dalam tim konsultan LAPI ITB adalah ahli transportasi.

5. Henry Armijaya

Henry Armijaya adalah anggota peneliti peneliti dari Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). Posisi Henry Armijaya dalam tim adalah sebagai analis kebijakan dan perancang survei-survei yang dibutuhkan untuk penyusunan Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung. Bersama tim LAPI ITB, Henry Armijaya juga selalu menjadi pembicara dalam setiap forum diskusi pemaparan Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung.

6. Ivan Nurmufidin

Ivan Nurmufidin adalah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Organda Jawa Barat. Posisinya di DPD Organda Jawa Barat tersebut memungkinkan dirinya memiliki pengetahuan mengenai berbagai gejala di anggota-anggota Organda ketika terjadi penolakan akibat kebijakan-kebijakan transportasi Pemerintah Kota Bandung. Terkait TMB dan Monorel, Ivan Nurmufidin selalu mengikuti forum-forum diskusi yang diselenggarakan dalam pembahasan perencanaannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam perencanaan TMB maupun Monorel di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menyatakan bahwa informasi mengenai proyek-proyek ini telah diberikan kepada masyarakat melalui sosialisasi, terutama kepada organisasi-organisasi pengusaha angkutan. Sosialisasi juga dilakukan dalam rapat-rapat expose dokumen perencanaan dalam memaparkan perkembangan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama rekanan konsultan perencanaan. Dalam perencanaan Monorel, informasi juga diberikan melalui mekanisme konsultasi publik yang harus dilakukan karena skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang akan diimplementasikan.

Sosialisasi biasanya dilakukan ketika perencanaan proyek memasuki tahap yang sudah matang. Diskusi-diskusi ataupun sosialisasi rencana jangka panjang terkait TMB maupun monorel tidak dimulai dari hal-hal yang lebih mendasar. Pemerintah Kota Bandung masih memiliki paradigma “pemegang kekuasaan” sehingga forum diskusi lebih ditujukan untuk memberikan informasi bahwa proyek akan dilaksanakan dan para stakeholders lainnya hanya menerima setiap keputusan yang diambil pemerintah.

Akses informasi juga diberikan melalui rilis situs resmi Pemerintah Kota Bandung, media massa, media sosial, dan brosur-brosur. Akses informasi terkait Trans Metro Bandung masih terbatas. Situs resmi yang memberikan akses informasi mengenai Monorel adalah

[www.lrt.bandung.go.id](http://www.lrt.bandung.go.id). Sedangkan akun media sosial yang banyak memberikan akses informasi adalah aku Walikota Bandung (@ridwankamil).

Forum pengambilan keputusan dalam perencanaan Koridor 1 Trans Metro Bandung dilakukan melalui rapat pelaporan dokumen perencanaan dengan Pemerintah Kota Bandung sebagai pengambil keputusan utama tanpa melibatkan *stakeholders* lain. Dalam pengembangan koridor pelayanan TMB selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung memberikan akses kepada *stakeholders* lain melalui pembentukan konsorsium yang menjadi forum pengambilan keputusan.

Forum pengambilan keputusan issue-issue teknis dalam perencanaan Monorel dilakukan dalam rapat pelaporan dokumen perencanaan dan konsultasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Keputusan pemilihan badan usaha yang akan menjadi pelaksana pembangunan Monorel, Pemerintah Kota Bandung menggunakan mekanisme lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Bappenas No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pemerintah Kota Bandung memberikan akses terhadap forum-forum pengambilan keputusan ini melalui sosialisasi agenda forum dan situs resmi [www.lrt.bandung.go.id](http://www.lrt.bandung.go.id).

Kesempatan membuka setiap issue perencanaan dilakukan melalui diskusi formal dan diskusi informal melalui situs resmi Pemerintah Kota Bandung dan akun media sosial pemerintah Kota Bandung. Kesempatan membuka issue dalam diskusi formal pelaporan dokumen perencanaan masih sangat terbatas karena keterbatasan jumlah peserta yang bisa difasilitasi. Kesempatan yang cukup besar diperoleh ketika rapat Konsultasi Publik dengan sosialisasi agenda rapat ini yang cukup terbuka. Konsultasi Publik ini dianggap merepresentasikan keterlibatan masyarakat karena banyaknya lapisan masyarakat yang bisa mengakses forum ini.

Kesempatan untuk membuka setiap issue melalui situs resmi Pemerintah Kota Bandung masih belum dilakukan secara optimal. Pemerintah Kota Bandung belum melakukan diskusi yang responsif melalui situs-situs resmi dalam menanggapi berbagai issue-issue perencanaan TMB maupun Monorel.

Diskusi publik melalui akun media sosial terutama dilakukan melalui akun Walikota Bandung (@ridwankamil). Interaksi yang terjadi dalam akun ini juga bisa dikategorikan sebagai diskusi-diskusi publik karena mekanisme penyampaian pesan antara masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung bisa terjadi secara langsung. Meskipun tidak semua pertanyaan

direspon oleh Walikota Bandung, tetapi format inilah yang paling mendekati diskusi publik antara masyarakat dengan pemerintahnya. Melalui media ini, issue-issue dapat dibuka sebesar mungkin tanpa adanya formalitas dan protokol yang harus diikuti oleh masyarakat. Intensitas diskusi-diskusi ini juga terjadi karena Walikota Bandung cukup responsif terhadap setiap issue yang diangkat oleh masyarakat.

Pengelolaan gugatan terhadap dampak yang diperkirakan akan terjadi pada tahap perencanaan pembangunan Monorel adalah keresahan sosial dan persepsi negatif masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan saat pra konstruksi, konstruksi dan operasi. Sedangkan dampak yang telah terjadi terhadap pembangunan Trans Metro Bandung adalah keresahan sosial dan persepsi negatif terhadap dampak yang ditimbulkan saat konstruksi dan operasi. Peneliti menemukan dua cara masyarakat dalam melakukan gugatan yaitu dengan melalui media dan penyampaian gugatan langsung. Adapun cara menyampaikan gugatan dengan bermedia meliputi saluran-saluran media seperti: media massa, situs internet dan media sosial. Sedangkan gugatan langsung dilakukan melalui demonstrasi seperti yang dilakukan pengusaha angkutan ketika menolak dioperasikannya TMB koridor 1.

Secara umum, pertimbangan selalu diberikan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan-gugatan tentang TMB maupun Monorel. Pola Pemerintahan saat ini telah memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk melakukan gugatan tanpa ketakutan akan adanya respon represif dari Pemerintah. Pertimbangan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan-gugatan dilakukan sesuai mekanisme pengajuan gugatan. Gugatan pengusaha angkutan terhadap TMB diselesaikan dengan pembentukan konsorsium yang diisi oleh para *stakeholders* yang terdampak oleh kebijakan TMB. Gugatan terhadap pemenang lelang operator diselesaikan dengan mekanisme ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Bandung menggunakan forum-forum sosialisasi, forum paparan laporan perencanaan, media massa, situs resmi [www.dishub.bandung.go.id](http://www.dishub.bandung.go.id), [www.lrt.bandung.go.id](http://www.lrt.bandung.go.id), dan media sosial dalam memberikan akses informasi terkait perencanaan Trans Metro

Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Tetapi informasi yang diberikan belum lengkap dan belum ada mekanisme umpan balik untuk permintaan informasi dari masyarakat.

Dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel, Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan akses yang cukup besar bagi masyarakat untuk ikut dalam forum-forum pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap forum-forum tersebut. Hanya pada saat Forum Konsultasi Publik Monorel, Pemerintah Kota Bandung memberikan sosialisasi undangan kepada masyarakat secara luas.

Kesempatan untuk membuka setiap issue dalam diskusi-diskusi publik terkait perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel diwujudkan dalam bentuk diskusi formal dan diskusi publik melalui media sosial. Dalam diskusi formal, partisipasi masyarakat yang cukup besar dilakukan dalam Konsultasi Publik perencanaan Monorel. Masyarakat lebih memilih menggunakan media sosial sebagai bentuk diskusi publik dalam membuka setiap issue terkait Trans Metro Bandung dan Monorel.

Kesempatan untuk mengajukan gugatan terkait Trans Metro Bandung dan Monorel diwujudkan melalui cara langsung dan melalui media. Gugatan dengan cara langsung dilakukan dengan demonstrasi penolakan Trans Metro Bandung. Gugatan melalui media yaitu dengan menggunakan situs [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) dan media sosial twitter dan personal blog.

Pertimbangan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan yang diajukan terkait perencanaan TMB dan Monorel dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan pembentukan konsorsium/forum stakeholders, penyelesaian sesuai ketentuan administratif, dan respon normatif atas gugatan-gugatan berupa keluhan masyarakat.

## **Saran**

Penelitian yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur transportasi, perlu dilakukan lebih mendalam lagi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk penguatan Ilmu Pemerintahan terutama bidang partisipasi masyarakat dan pelayanan transportasi.

Penelitian berkelanjutan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kajian terkait partisipasi masyarakat dari perspektif kondisi sosial masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi yang dipilih masyarakat dalam perencanaan pelayanan transportasi.

Guna memaksimalkan proses pengembangan Trans Metro Bandung dan perencanaan Monorel di Kota Bandung perlu diperbesar akses informasi kepada masyarakat melalui optimalisasi situs dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung perlu membuka akses lebih besar terhadap forum-forum pengambilan keputusan melalui sosialisasi yang lebih luas dengan menggunakan situs resmi dan akun media sosial. Pemerintah Kota Bandung perlu membuka kesempatan lebih besar bagi diskusi-diskusi publik sehingga masyarakat dapat membuka setiap issue terkait Trans Metro Bandung dan Monorel. Pemerintah Kota Bandung perlu membuat prosedur pengajuan dan pertimbangan terhadap setiap gugatan terkait Trans Metro Bandung dan Monorel.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abe, A. (2001). *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- Arnstein, S. (2007). A Ladder Participation. In R. LeGates, & F. Stout, *The City Reader* (p. 233). London: Routledge.
- Black, W. R. (2010). *Sustainable Transportation (Problems and Solutions)*. London: The Guilford Press.
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creighton, J. (2005). *The Public Participation Handbook*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. (2010). *Research design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, K. (1962). *Human Relation at Work*. New York : McGraw Hill Book Company Inc.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service*. London: M.E. Sharpe, Inc.
- Doak, J., & Parker, G. (2012). *Key Concepts in Planning*. London: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hall, A. (1986). *Community Participation, Social Development and State*. London: Methven & Co.
- Handoko, T. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kaho, J. R. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat Tinjau Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Muluk, K. (2010). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasution, M. N. (2008). *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Redjo, S. I. (2012). *Transformasi Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Aipi Bandung.
- Sastropoetro, S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Schiller, P. L., Bruun, E. C., & Kenworthy, J. R. (2010). *An Introduction to Sustainable Transportation*. Washington DC: Earthscan.
- Schobel, A. (2006). *Optimization in Public Transportation*. New York: Springer.
- Siagian, S. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1986). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Slamet. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Strauss, A. C., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: Sage Publications, Inc.

- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tamim, Raad, and Paul Barter. *Taking Steps: A Community Action Guide to People-Centred, Equitable and Sustainable Urban Transport*. Sustainable Transport Action Network For Asia And The Pacific (SUSTRAN), 2000.
- Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB.
- Tjokroamidjojo, B. (1996). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Widaningrum, A. (2007, Mei). Bekerjanya Desentralisasi pada Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik MAP UGM*.

**Tesis:**

- Adrianto, Bowo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Alam, Amrul. 2011. *Analisis Prioritas Kebijakan Transportasi Kota Tangerang*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Alfiandra. 2010. *Kajian Partisipasi Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Pramono, Agus, 2008. *Pengelolaan Transportasi Ramah Lingkungan Di Kota Mataram*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Prayitno, Didi. 2008. *Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Rahman, Zaini. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di DPR RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sumiyarsono, Elmi. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Wibowo, Agus Harto. 2009. *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang) Jawa Tengah*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Zaikyyah, Ratu Ekky. 2011. *Potensi Pendanaan Mekanisme Pembangunan Bersih Sektor Transportasi Di Kota Jakarta (Studi Emisi CO2 Mass Rapid Transit Jakarta)*. Jakarta. Universitas Indonesia

### **Dokumentasi:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (2009-2029)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung

*Masterplan Transportasi Kota Bandung*. 2009. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

*Masterplan Transportasi Kota Bandung*. 2013. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

*Study of the Bandung Metropolitan Area (BMA) Urban Transport Master Plan*. 2010. Bandung. SNCF International dan LAPI ITB.

*Studi Integrated Transportation System di Kota Bandung*. 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

### **Rujukan Elektronik:**

Bisnis.com. (2012, 28 Agustus). MRT Bandung Ditargetkan 2016 terealisasi. Diperoleh 4 Maret 2015, dari <http://www.bisnis.com/articles/mrt-bandung-ditargetkan-2016-teralisasi>

Detik.com. (2012, 25 Oktober). Bahas MRT Pemkor dan Panghegar Group. Diperoleh 4 Maret 2015 dari <http://bandung.detik.com/read/2012/10/25/151134/2073048/486/bahas-mrt-pemkot-dan-panghegar-grup-undang-tim-teknis-dari-cina?g991102485>

- \_\_\_\_\_. (2014, 6 Maret). Awal April Pemkot Bandung Lelang Proyek Monorel. Diperoleh 4 Maret 2015 dari <http://news.detik.com/bandung/read/2014/03/06/193341/2518084/486/awal-april-pemkot-bandung-lelang-proyek-monorel?nd771104bcj>
- \_\_\_\_\_. (2013, 24 September 2013). Daftar Akun Twitter Dinas di Kota Bandung. Diperoleh 4 Maret 2015 dari <http://news.detik.com/bandung/read/2013/09/24/092851/2367409/486/ini-daftar-akun-twitter-dinas-dinas-di-kota-bandung>
- Energi Today. (2013, 7 Agustus). Monorel Bandung Memasuki Tahap Persiapan Studi Kelayakan. Diperoleh 3 Maret 2015, dari <http://energitoday.com/2013/08/07/monorel-bandung-memasuki-tahap-pesiapan-study-kelayakan/>
- Fokus Jabar. (2013, 27 Maret). MRT Kota Bandung Baru Tahap Detail Engineering Design. Diperoleh 5 Maret 2015 dari <http://www.fokusjabar.com/2013/03/27/jiah-mrt-kota-bandung-baru-tahap-detail-engineering-design/>
- Galamedia.com. (2012, 30 Agustus). Dishub Optimistis MRT Bisa Terwujud. Diperoleh 4 Maret 2015 dari <http://klik-galamedia.com/dishub-optimistis-mrt-bisa-terwujud>
- \_\_\_\_\_. (2014, 22 Februari). Pembangunan Monorel Undang Reaksi Warga. Diperoleh 4 Maret 2015 dari <http://www.klik-galamedia.com/pembangunan-monorel-undang-reaksi-warga>
- Kompas.com. (2010, 3 November). Pemkot Bandung Lirik Monorel. Diperoleh 3 Maret 2015, dari <http://properti.kompas.com/read/2010/11/03/11325731/Pemkot.Bandung.Lirik.Monorel>
- \_\_\_\_\_. (2014, 21 Januari). Kota Bandung Ditawari Teknologi Monorel Jerman. Diperoleh 4 Maret 2014 dari <http://regional.kompas.com/read/2014/01/21/0748108/Kota.Bandung.Ditawari.Teknologi.Monorel.Jerman>
- \_\_\_\_\_. (2014, 8 September). Ridwan Kamil Investor Monorel Bandung Harus Punya Modal. Diperoleh 4 Maret 2014, dari <http://regional.kompas.com/read/2014/09/08/21434721/Ridwan.Kamil.Investor.Monorel.Bandung.Harus.Punya.Modal>
- Pikiran Rakyat. (2013, 5 Juli). Ridwan Kamil Janjikan Monorel. Diperoleh 5 Maret 2015 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/241606>
- \_\_\_\_\_. (2012, 4 September). Shelter TMB Dinilai Proyek Mubazir. Diperoleh 4 Maret 2015 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/09/04/202070/selter-tmb-dinilai-proyek-mubazir>

Tempo.co. (2011, 6 Januari). Pemerintah Siapkan Masterplan Transportasi Massal. Diperoleh  
4 Maret 2015 dari  
[http://bisnis.tempo.co/read/news/2011/01/06/090304348/pemerintah-siapkan-  
masterplan-transportasi-massal](http://bisnis.tempo.co/read/news/2011/01/06/090304348/pemerintah-siapkan-masterplan-transportasi-massal)